




THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY

Priska Trivena Regina Ludji¹, Aldarine Molidya², Cicilia A. Tungga³

^{1,2,3} Universitas Nusa cendana, Kupang (85228)
* Corresponding Author: ludjitrivena@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Articles History: Accepted tgl. 28/05/2025 Repaired tgl. 29/05/2025 Approved tgl. 29/05/2025 Available online tgl. 30/05/2025</p>	<p>This study aims to analyze the implementation of good governance principles – namely transparency, accountability, and public participation – in regional financial management in South Central Timor Regency. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, documentation, and analysis using NVivo software. The findings indicate that the local government has made efforts to implement transparency through digital information systems and public information dissemination, although challenges remain, such as the limited use of social media. Accountability is pursued through internal audits and the publication of financial reports, but there are still issues concerning the effectiveness of oversight. Public participation in budget management remains largely formal and has yet to become fully participatory. The study concludes that the application of good governance principles in South Central Timor Regency is underway but still requires strengthening, particularly in implementation and community involvement, to achieve better and more sustainable governance.</p>
<p>ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312</p>	
<p>DOI: 10.58290/jmbo.v4i1.428</p>	<p>Keywords: Good Governance, Transparency, Accountability, Public Participation, Regional Finance</p>
<p> ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>	

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kondisi fiskal suatu wilayah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola

sumber daya secara mandiri, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan publik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun pemerintah daerah

telah memiliki pedoman hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada praktiknya implementasi prinsip-prinsip good governance masih menghadapi berbagai kendala.

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh yang menarik dalam mengkaji penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten TTS telah menunjukkan beberapa capaian positif seperti diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun anggaran 2023. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti pelaksanaan belanja modal yang belum sesuai ketentuan, pengelolaan dana BOS yang tidak akurat, serta tertib administrasi aset tetap yang belum optimal. Selain itu, dari sisi transparansi, pemanfaatan media digital dan keterbukaan informasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperburuk dengan belum maksimalnya pemanfaatan media sosial, sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) yang belum merata, serta keterbatasan jaringan dan infrastruktur yang menghambat distribusi informasi secara adil dan merata.

Dari sisi akuntabilitas, tantangan terbesar adalah belum optimalnya pengawasan internal serta masih adanya

budaya birokrasi yang paternalistik dan kurang responsif terhadap perubahan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan program dan anggaran yang seharusnya berorientasi pada hasil. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah cenderung bersifat simbolis—masyarakat hadir dalam forum musyawarah, tetapi tidak secara aktif menyuarakan ide atau memberikan masukan yang substansial. Ketimpangan akses informasi, rendahnya literasi anggaran di tingkat akar rumput, serta kurangnya mekanisme pelibatan masyarakat secara inklusif menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keterlibatan publik yang sejati.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, baik dari aspek struktural, teknis, maupun kultural. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, peneliti berupaya menghadirkan gambaran nyata dari praktik tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Kontribusi dari penelitian ini dapat

dilihat dari tiga sisi. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks daerah tertinggal dan berkembang seperti TTS. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat partisipasi masyarakat secara lebih substansial. Ketiga, dari sisi sosial, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih aktif mengawal anggaran publik dan ikut serta dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi sarana akademik, tetapi juga instrumen perubahan menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan partisipatif.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, kepatuhan terhadap hukum, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, penguatan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Good governance menurut UNDP (1997) adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. World Bank menekankan bahwa good governance mencakup pengelolaan pembangunan secara bertanggung jawab, sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pilar utama good governance adalah transparansi, yang mengacu pada keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan pemerintahan. Pemerintah wajib menyediakan informasi anggaran dan kebijakan publik yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini penting untuk menghindari penyelewengan dana dan membangun kepercayaan publik. Dalam konteks keuangan daerah, transparansi mencakup penyajian APBD, laporan keuangan, dan penggunaan belanja publik secara berkala dan terbuka.

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dalam

pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas tercermin dari ketaatan terhadap regulasi, audit internal dan eksternal, serta sistem pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar. Menurut PP No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, akuntabilitas menjadi bagian integral dari evaluasi kinerja pemerintahan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

Prinsip partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Partisipasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial – di mana masyarakat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran. Menurut teori *New Public Management* (Osborne & Gaebler), partisipasi mendorong legitimasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Pemerintah yang membuka ruang dialog dan musyawarah (seperti forum musrenbang) menunjukkan komitmen terhadap pelibatan publik dalam pembangunan.

Dengan demikian, ketiga prinsip tersebut saling terkait dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun sistem keuangan daerah yang efisien, bebas korupsi, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini

berupaya mengkaji implementasi ketiga prinsip ini secara konkret di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penggalian data dari berbagai sumber, serta memberikan deskripsi yang kaya mengenai realitas di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik tindakan, proses, dan struktur sosial yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dari dokumen-dokumen resmi yang merefleksikan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Data kuantitatif

berupa angka-angka dalam laporan keuangan daerah, realisasi anggaran, serta indikator fiskal lainnya yang digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTS, yang memahami secara langsung kebijakan fiskal dan pelaksanaan tata kelola keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan publikasi pemerintah maupun akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemahaman informan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran, dokumen perencanaan pembangunan, dan arsip kebijakan keuangan daerah, guna memperoleh gambaran kontekstual yang mendalam mengenai praktik tata kelola keuangan di Kabupaten TTS.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis data spiral Creswell dan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Analisis spiral Creswell melibatkan tahapan yang meliputi pengumpulan data, pembacaan menyeluruh, pengkodean data, pengelompokan kategori, interpretasi makna, hingga penyusunan narasi deskriptif. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap data yang diperoleh. Selain itu, penggunaan NVivo 12 memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data wawancara dan dokumen ke dalam node/kode tertentu, memvisualisasikan frekuensi kata, serta membangun model konseptual yang mendukung interpretasi hasil penelitian secara sistematis. Dengan kombinasi kedua teknik ini, analisis yang dihasilkan menjadi lebih mendalam, valid, dan mampu menjelaskan realitas yang kompleks terkait penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten timor tengah selatan. berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis menggunakan perangkat lunak nvivo, diperoleh

sejumlah temuan penting yang menunjukkan keberhasilan sekaligus tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, dalam hal transparansi, pemerintah kabupaten tts telah menunjukkan inisiatif untuk membuka akses informasi publik melalui berbagai media, seperti situs web resmi pemerintah daerah, papan pengumuman di kantor dinas, serta penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital. informasi yang dibuka mencakup APBD, laporan kinerja, serta data keuangan strategis lainnya. namun demikian, keterbukaan ini masih memiliki batasan. pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi publik belum maksimal, dan belum semua informasi dipublikasikan secara lengkap dan tepat waktu. hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan secara struktural, namun belum sepenuhnya berjalan secara fungsional dan inklusif. selain itu, belum meratanya jaringan internet dan keterbatasan kapasitas SDM di wilayah pedesaan menjadi hambatan signifikan dalam distribusi informasi publik yang merata dan efisien.

kedua, dari sisi akuntabilitas, pemerintah kabupaten tts telah melaksanakan audit internal, menyusun laporan keuangan yang dipublikasikan, serta melakukan koordinasi dengan BPK dan inspektorat. praktik ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan keuangan publik. namun, masih ditemukan kelemahan dalam

pelaksanaan anggaran, misalnya ketidaksesuaian dalam belanja modal, pengelolaan dana BOS yang tidak tertib, dan pencatatan aset tetap yang belum sepenuhnya akurat. fenomena ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas secara administratif telah dijalankan, namun akuntabilitas berbasis kinerja dan hasil belum optimal. budaya birokrasi yang masih cenderung paternalistik serta pengawasan internal yang belum ketat turut memperlemah efektivitas sistem akuntabilitas.

ketiga, terkait partisipasi masyarakat, keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah dinilai masih bersifat seremonial. masyarakat hadir dalam forum musyawarah, namun kontribusi mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan keputusan. beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya literasi anggaran di tingkat masyarakat, kurangnya edukasi tentang hak partisipasi, serta keterbatasan kanal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. meskipun pemerintah telah membuka ruang melalui musrenbang dan forum publik lainnya, kualitas partisipasi belum menunjukkan keterlibatan yang substansial dan kritis dari warga. ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan formal-partisipatif dengan realitas implementatif yang lebih pasif.

secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance telah mulai diadopsi dalam pengelolaan keuangan daerah di

kabupaten timor tengah selatan, terutama pada aspek struktural dan prosedural. namun demikian, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang benar-benar baik dan berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan dalam beberapa hal penting. pertama, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi secara real time dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. kedua, peningkatan kapasitas sdm dan sistem pengawasan internal agar prinsip akuntabilitas berjalan lebih efektif. ketiga, penguatan pendidikan dan literasi publik mengenai pengelolaan keuangan daerah, agar partisipasi masyarakat tidak hanya simbolis, tetapi juga aktif dan kritis dalam mengawal pembangunan.

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prinsip good governance telah mulai diterapkan, keberhasilan implementasinya masih bersifat parsial dan menghadapi tantangan serius, baik dari sisi teknis, kultural, maupun struktural. pemerintah kabupaten tts perlu mengadopsi strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil, guna memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif demi tercapainya Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan prinsip transparansi di Kabupaten Timor Tengah

Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, khususnya dalam memberikan akses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, serta kebijakan strategi yang menjangkau kepentingan publik. Upaya ini tercermin dari penyediaan informasi publik melalui berbagai saluran, seperti papan pengumuman di kantor desa dan kecamatan, laporan laporan kegiatan secara berkala, serta pemanfaatan situs web resmi pemerintah daerah. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara rutin menyusun laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan tersebut berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, mencakup informasi menyeluruh mengenai posisi keuangan, pendapatan, belanja, dan realisasi pelaksanaan anggaran pada periode tertentu. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup positif, khususnya dalam aspek penyampaian aspirasi, saran, dan keluhan terhadap

kebijakan publik serta pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang cukup aktif dalam menyuarakan pendapat melalui berbagai saluran komunikasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah, seperti forum konsultasi publik, musyawarah desa, kotak saran, dan layanan pengaduan berbasis digital maupun manual. Ini mencerminkan adanya kesadaran awal masyarakat terhadap hak mereka untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Minimnya edukasi atau sosialisasi dari pemerintah tentang mekanisme partisipasi yang tersedia menjadi hambatan tersendiri. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait agenda, hasil, dan proses pengambilan keputusan menyebabkan rendahnya minat dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Tantangan lainnya adalah masih kuatnya budaya ketergantungan, di mana masyarakat lebih memilih menunggu inisiatif dari pemerintah daripada turut mengambil peran dalam proses pembangunan. Faktor infrastruktur dan geografis juga turut menjadi kendala, terutama di wilayah desa terpencil yang akses terhadap informasi dan forum publik sangat terbatas. Proses birokrasi yang masih dianggap rumit dan kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat juga menjadi penghalang partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Nasir Hamzah, M., & Provinsi Sulawesi Selatan, P. (n.d.). Jurnal Sains Manajemen Nitro Analisis Good Governance dan Kualitas Pegawai terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kejelasan Sasaran Anggaran pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. In Jurnal Sains Manajemen Nitro (Vol. 2, Issue 2). <https://ojs.nitromks.ac.id/index.php/jsmn>
- Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, & Rudiana Rudiana. (2023). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 185-192. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.660>
- Dwiyanti, O. M., & Abstraksi, S. (n.d.). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).
- Karlo Boyoh, J., E Saerang, D. P., L Warongan, J. D., Studi Magister Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Sam Ratulangi Jl, U. (n.d.). ANALISIS PENERAPAN GOOD

- GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD PEMERINTAH KOTA BITUNG. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* (Vol. 14, Issue 2).
- KEUANGAN DESA Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, P., Belitang Hilir, K., Sekadau Dwi Prihatini, K., Kurniawan, H., Studi Akuntansi, P., Untan, F., & Barat, K. (2021). 28) ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP. 1(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. 2(1), 25-31. <https://doi.org/10.37541/eq.v2i1.510>
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294>
- Yuvita Taneo, O., Paleina Nawa Pau, S., & Prudensiana Leda Muga, M. (n.d.). PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE (Vol. 11, Issue 2).
- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304-316. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5040>
- Maryam, N. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1-18.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65-84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>
- MZ, B. R., Asmeri, R., & Putri, S. Y. A. (2024). Pengaruh Keputusan Pendanaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(4), 418-430.

Noguer i Alonso, M., & Zooneynd, V.
(2024). Information Theory and
Efficient Market Hypothesis.
*Vincent, Information Theory and
Efficient Market Hypothesis (July 25,
2024).*

Suhendra, D. X. T., & Airawaty, D. (n.d.).
*Pengaruh Faktor Ekonomi Makro
Terhadap Fluktuasi Harga Saham di
Sektor Teknologi.*